



**PERANAN RUANG PUBLIK
DALAM PERANCANGAN KOTA
(*URBAN DESIGN*)**

PIDATO PENGUKUHAN

Diucapkan pada Upacara Penerimaan
Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Semarang, 1 September 2007

Oleh :

EDY DARMAWAN

**PERANAN RUANG PUBLIK
DALAM PERANCANGAN KOTA
(*URBAN DESIGN*)**

Prof.Ir. Edy Darmawan, M.Eng

PIDATO PENGUKUHAN

Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar
dalam Ilmu Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Semarang, 1 September 2007

Cetakan I, 2007

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

ISBN : 978.979.704.546.3

*Kesalahan terbesar yang mungkin diperbuat
seseorang adalah tidak berbuat apa-apa*

(John C. Maxwell)

*Orang yang sukses
akan memetik manfaat dari kesalahan-kesalahannya
dan mencoba lagi dengan cara lain*

(Dale Carnegie)

Yang Terhormat:

- Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro.

Yang saya hormati:

- Sekretaris Senat, Para Anggota Senat dan Dewan Guru Besar.
- Ketua dan Para Anggota Dewan Penyantun
- Para Pejabat Sipil, Militer dan Polri
- Para Pembantu Rektor
- Para Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- Para Dekan dan Pembantu Dekan
- Para Ketua Lembaga/Ketua Program/Ketua Jurusan/Kepala Biro baik di lingkungan Undip maupun luar Undip
- Para Mahasiswa dan Fungsionaris Mahasiswa
- Tamu Undangan, Keluarga dan Para Hadirin serta segenap sivitas akademika Undip yang saya hormati dan saya muliakan,

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semua sehingga pada pagi yang bahagia ini kita dapat hadir pada Sidang Senat Terbuka Universitas Diponegoro dengan acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dalam keadaan sehat walafiat .

Dengan tulus saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-Saudara sekalian yang memberikan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya seketuarga.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Arsitektur Kota dengan judul :

**PERANAN RUANG PUBLIK DALAM PERANCANGAN KOTA
(URBAN DESIGN)**

Para Hadirin yang saya muliakan.

**PERANAN
RUANG PUBLIK**

Peranan ruang publik sebagai salah satu elemen kota dapat memberikan karakter tersendiri, dan pada umumnya memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat apresiasi budaya. Secara langsung nilai komersial yang ditawarkan tidak begitu menjanjikan bagi investor yang berminat berkiprah menanamkan modalnya, karena masyarakat yang menggunakan ruang publik untuk usaha atau kegiatan sosial yang lain tidak memungkinkan ditarik pajak terlalu tinggi karena daya beli yang relatif rendah, sehingga tidak dapat diandalkan untuk pengembalian modal bagi investor secara langsung. Perlu dipikirkan keterkaitan antara fasilitas pelayanan umum yang memiliki nilai komersial dengan ruang-ruang publik secara sinergis. Dalam pasal 28 UU RI Nomer 26 tahun 2007 perlunya rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan nonhijau, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Secara rinci dipertegas dengan pasal 29 yang merupakan kelanjutan pasal 28 bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20%. Karena pentingnya fungsi ruang publik dalam perencanaan kota perlu diuraikan sebagai berikut (Darmawan, 2003).

- a. Sebagai pusat interaksi, komunikasi masyarakat, baik formal maupun informal seperti upacara bendera, Sholat Ied pada Hari Idul Fitri, dan peringatan-peringatan yang lain; serta informal seperti pertemuan-pertemuan individual, kelompok masyarakat dalam acara santai dan rekreatif seperti konser musik yang diselenggarakan

berbagai televisi swasta atau demo mahasiswa yang menjadi pemandangan sehari-hari akhir-akhir ini dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi, ide-ide atau protes terhadap keputusan-keputusan pihak penguasa, instansi atau lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang lain.

- b. Sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor, jalan yang menuju ke arah ruang publik tersebut dan ruang pengikat dilihat dari struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang-ruang fungsi bangunan di sekitarnya serta ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah ke arah tujuan lain.
- c. Sebagai tempat pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman, pakaian, *souvenir*, dan jasa *intertainment* seperti tukang sulap, tarian kera dan ular, dan sebagainya.
- d. Sebagai paru-paru kota yang dapat menyegarkan kawasan tersebut, sekaligus sebagai ruang evakuasi untuk menyelamatkan masyarakat apabila terjadi bencana gempa atau yang lain.

Sebaliknya, timbul dilema karena banyak investor yang mengincar ruang-ruang publik kota sebagai tempat bisnis. Secara langsung investor beranggapan bahwa pemanfaatan ruang-ruang publik kota tersebut secara langsung tidak banyak memberikan kontribusi yang berarti, sehingga banyak yang bersikeras untuk mengubah fungsi ekonomi yang lebih menguntungkan, contohnya: *departement store* dibangun di kawasan alun-alun kota. Di masa mendatang pada setiap program yang akan merubah fungsi ruang publik dengan fungsi lain harus melalui proses yang melibatkan pendapat atau aspirasi masyarakat kota, dan mempertimbangkan Undang Undang baru Penataan Ruang.

Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat kehidupan sosial – ekonomi – etnik, tingkat pendidikan, perbedaan umur dan motivasi atau tingkat kepentingan yang berlainan. Kriteria ruang publik secara esensial ada tiga macam sbb :

- a. Dapat memberikan makna atau arti bagi masyarakat setempat secara individual maupun kelompok (*meaningful*).
- b. Tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang publik tersebut (*responsive*).
- c. Dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa ada diskriminasi (*democratic*).

Siapa pun tanpa membedakan anak, dewasa, atau orang tua, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, atasan atau bawahan, dapat memanfaatkan ruang publik kota untuk segala macam kegiatan baik individual atau berkelompok. Kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan itulah kadang-kadang perlu pengendalian aktivitas-aktivitas yang terjadi, perlu pengaturan fungsi ruang, sirkulasi lalu lintas dan parkir kendaraan bermotor, perlu penempatan pedagang kaki lima dan sebagainya sehingga pengertian demokratis tidak diartikan sebagai kebebasan yang menyimpang dari harapan kita.

Secara langsung dari segi finansial, fungsi ruang publik tidaklah memberi kontribusi besar kepada investor, akan tetapi ruang publik merupakan salah satu pendukung kegiatan dalam perancangan kota yang harus dipertimbangkan, secara tidak langsung sangat mendorong perkembangan kawasan tersebut seperti contohnya dalam penelitian tentang ruang publik Simpang Lima. Menunjukkan bahwa tiga kriteria diatas dapat dicapai dengan baik (Yolanda, 2002) Selanjutnya diperlukan penataan yang baik agar dapat tercapai keseimbangan di kawasan tersebut.

Para Hadirin yang saya muliakan

**PERMASALAHAN
RUANG PUBLIK
KOTA**

Sampai saat ini Pemerintah Kota, investor, pengembang (*developer*), dan masyarakat luas masih belum banyak menyentuh perancangan ruang publik Kota. Secara langsung Ruang-ruang publik belum dapat memberikan keuntungan secara finansial. Kadang-kadang Pemerintah Kota lebih merencanakan dan merevisi kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota secara periodik, sehingga perencanaan yang lebih detail belum banyak terealisasi berdasarkan hirarkinya. Padahal banyak sekali permasalahan ruang publik kota antara lain perubahan-perubahan fungsi taman kota menjadi fungsi bangunan yang tidak terkendali, trotoar dipakai untuk pedagang kaki lima (PKL) sehingga mengganggu hak hak bagi pejalan kaki, masalah penataan parkir yang tidak pernah dipikirkan kelayakannya terutama di pusat-pusat fasilitas pelayanan umum, sehingga mengakibatkan macetnya transportasi kota. Perencanaan ruang-ruang publik akan muncul pada produk Tata Ruang Kota yang lebih detail, misalnya pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) yang merupakan bagian dari Rencana yang lebih makro seperti RDTRK dan RUTRK. Perencanaan ruang publik biasanya tidak akan didesain selama perencanaan yang lebih makro belum ada. Hal inilah yang perlu dipahami oleh Pengelola Kota dan masyarakat pada umumnya. Beberapa terobosan dilakukan oleh instansi-instansi yang berkompeten untuk mendesain ruang publik dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) meskipun belum ada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)nya, dapat mengacu pada hirarki yang lebih makro seperti Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang ada. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pedoman teknis dalam mengendalikan pembangunan yang sangat cepat.

Perencanaan ruang publik yang terkait dengan (RTBL) atau (RTRK) tidak mengacu pada Kriteria Desain Tak Terukur (*Non measurable design criterias*) yang melibatkan peran dari masyarakat pengguna secara sungguh-sungguh, sehingga ruang-ruang publik yang didesain, banyak yang tidak sesuai dengan kenyamanan masyarakat pengguna.

Dalam perencanaan ruang publik sering tidak dipikirkan ke depan tentang perawatan dan pengelolaannya. Desain ruang-ruang publik yang dirancang dengan penekanan estetika dan bentuk yang rumit akan menyulitkan dalam perawatan. Bagaimana sistem pengelolaannya perlu dipikirkan, karena selama ini semua ruang publik dibebankan Pemerintah Kota. Metode pengelolaan inilah yang perlu dikembangkan menjadi metode kemitraan bersama masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya.

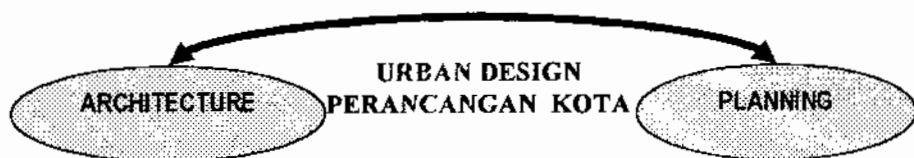
Masih banyak ruang-ruang kota yang tidak berfungsi, (*unusage*) baik ruang kecil maupun ruang-ruang yang luas belum dimanfaatkan secara optimal serta belum disentuh untuk pengembangan ruang publik Kota. Sosialisasi pentingnya peranan ruang publik dalam meningkatkan kualitas ruang kota pada masyarakat perlu ditingkatkan, di samping memotivasi mereka untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan ruang kota.

Pembangunan ruang-ruang publik di Indonesia masih belum banyak yang memikirkan tentang aksesibilitas bagi orang cacat atau orang yang memiliki kemampuan yang berbeda (*diffable*). Hal ini sangat dirasakan sekali bagi mereka, sehingga ruang gerak mereka sangat terbatas dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, ini tidak sesuai dengan keinginan hati nurani mereka yang ingin mandiri seperti layaknya orang normal.

Para Hadirin yang saya muliakan.

Pemahaman tentang Perancangan Kota (*Urban Design*) oleh beberapa kalangan mahasiswa, praktisi maupun masyarakat masih rancu. Dalam praktik di lapangan berbagai aspek regional, kawasan maupun detail, fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan menjadi bahan pertimbangan. Gosling dan Maitland (1984) dalam Hidle B (1999) mengatakan bahwa perancangan kota merupakan jembatan antara perencanaan kota dan arsitektur (*Urban design as bridging the gab between planning and architecture*). Perencanaan kota lebih menitikberatkan pada bentuk tata guna lahan (*landuse pattern*) dan masalah sosial ekonomi, sedangkan arsitektur lebih pada perancangan bangunan (Conway.H dan Roenish.R, 1994). Dari perbedaan itu muncul Perancangan Kota sebagai ilmu yang berperan merancang ruang-ruang publik (*the design of public spaces*).

It is concerned with the physical form of the public realm over a limited physical area of the city and that it there fore lies between the two well established design scales of architecture, which is concerned with the physical form of the private realm of the individual building, and town and regional planning, which is concerned with the organization of public realm in its wider context. (Frey, H; 1999)



Gb.1 Kedudukan Ilmu Perancangan Kota (*Urban Design*)

Perancangan Kota (*Urban Design*): menitikberatkan pengguna (*user*), Fasilitas pelayanan umum di lapangan, bentuk-bentuk aktivitas, infrastruktur dll.

Karakteristik Perancangan Kota (*Urban Design*) sulit dibedakan dengan perencanaan kota secara luas, sehingga beberapa konsep yang dikemukakan oleh Yokio Nishimura (1999) bahwa ada elemen-elemen *urban design* yang dapat membedakan dengan jelas dengan desain yang lain:

Bagaimana menentukan langkah awal untuk mengevaluasi kedudukan dan sejarah ruang-ruang kota tersebut? Pendekatan yang terbaik dalam *urban design* adalah mempertimbangkan aspek sosial yang berkaitan dengan ruang-ruang kota yang ada.

Urban design didasarkan pada persepsi dari ruang-ruang kota (*urban spaces*) sebagai objek yang dapat direkayasa atau dimodifikasi. Sehingga perlu strategi yang dapat menciptakan bentuk yang melebihi keadaan semula, seperti usaha revitalisasi elemen peninggalan yang ada di kota dengan memperhitungkan perubahan fisik penting dan pengaruh terhadap kegiatan penghuninya.

Urban design merupakan bagian dari kota, sehingga fungsi dari perancangan tersebut harus berkaitan dengan fungsi-fungsi bagian kota yang lain, dan secara menyeluruh merupakan bagian dari jaringan yang ada. *Urban design* dapat merefleksikan strategi kebijakan secara integral, sehingga tidak terjadi ketimpangan program dalam pembangunan.

Urban design tidak hanya merupakan konsep estetika, tetapi suatu proses pengambilan keputusan termasuk aspek sosiologi kota dengan mengacu pada strategi global. Oleh karena itu perencanaan kegiatan harus jelas tujuannya, berdasarkan prediksi pada masa mendatang.

Hasil dari *urban design* menitikberatkan pada masalah yang penting atau mendesak bagi kehidupan manusia dan kegiatan kotanya.

Urban design adalah suatu bentuk perancangan yang berkelanjutan dan tidak akan pernah selesai (*never ending movement*), persoalan baru selalu ada setiap saat seiring dengan tuntutan kebutuhan manusia yang selalu berkembang dengan teknologi yang semakin modern.

Urban design terdiri dari desain perangkat keras (*hard ware*) dan desain lunak (*soft space*). Perangkat keras merupakan desain fisik, sedangkan perangkat lunak merupakan alat kontrol efektif. Perubahan struktur ruang kota secara internal dapat dicapai dengan pendekatan terhadap perilaku dari individu-individu penghuni kota tersebut. Keterkaitan antara perangkat keras dan lunak merupakan satu konsep yang harus diperhitungkan dalam perancangan kota (*urban design*).

Para Hadirin yang saya muliakan.

RUANG PUBLIK SEBAGAI ELEMEN PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)

Berbicara masalah elemen dalam *Urban Design*, terdapat banyak pendapat yang berlainan. Ada yang berpikir bahwa masalah utama dalam urban design adalah faktor keindahan, sehingga elemen yang perlu dipikirkan antara lain: pepohonan, perabot jalan, paving, trotoar, penerangan, tanda-tanda asesori kota dan sebagainya. Lingkup urban design seperti yang telah diketahui, merupakan bagian dari proses perencanaan kota yang berkaitan dengan masalah kualitas fisik lingkungan. Dalam praktik tidak dapat sepenuhnya memasukkan semua elemen atau komponen kota ke dalam objek perancangan yang sudah terbentuk sebelumnya, karena akan mengalami berbagai kesulitan. Ruang-ruang yang berada di antara bangunan disebut ruang publik dalam *urban design*. Bagaimana cara mendesain ruang tersebut? Ada beberapa contoh antara lain pada *Urban*

Design Plan di San Francisco tahun 1970 yang berusaha menghubungkan 4 kelompok ruang-ruang; (1) Bentuk dan kesan secara internal (*internal pattern and image*), (2) Bentuk dan kesan secara eksternal (*external form and image*), (3) Parkir dan sirkulasi (*circulation and parking*), lebih berkaitan dengan melihat jalan dan karakteristiknya, baik dari aspek kualitas perawatan, luasan, susunan, kemonotonan, kejelasan dari rute, orientasi ke tujuan, aman, kemudahan sirkulasi, persyaratan parkir dan lokasinya. (4) Kualitas lingkungan (*quality of environment*) (Shirvani, 1985; Darmawan, 2003). Dalam menilai Kualitas Lingkungan delapan faktor yang harus diperhatikan yakni: (1) kecocokan dalam penggunaan lahan, (2) keberadaan elemen-elemen alami, (3) arah ke ruang terbuka, (4) pandangan yang menarik dari tampak potongan membujur jalan, (5) kualitas dari sudut-sudut pemandangan, (6) kualitas perawatan, (7) kebisingan, dan (8) klimatologi. Dulu para desainer lebih memperhatikan aspek *internal pattern image* dan *external form and image* (Gifford.R, 1987; Heimsath.C, 1980), karena kedua aspek ini lebih berorientasi pada aspek fisik dalam *urban design*. Terutama elemen fisik yang lebih spesifik seperti *plaza*, *mall*, area tempat duduk, pohon-pohon, lampu-lampu hias atau elemen lain yang spesifik bagi lingkungan masyarakat setempat. Beberapa analisis terhadap elemen *urban design* menghasilkan beberapa variasi bentuk, kebijakan, perancangan, pedoman perancangan, program lain di kota-kota yang berlainan.

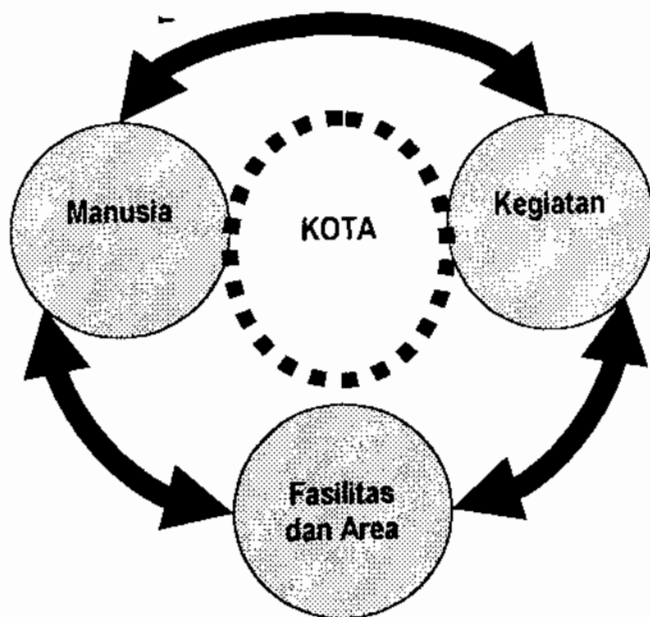
Dari beberapa pengalaman dalam praktik, untuk menentukan elemen-elemen dalam urban design yang saling terkait satu dengan yang lain. Hamid Shirvani (1985), menentukan elemen *urban design* dalam delapan kategori sebagai berikut: (1) Tata guna lahan, (2) Bentuk bangunan dan massa bangunan (Krier.R, 1979), (3) Sirkulasi dan ruang parkir (Childs.M, 1999) (4) Ruang terbuka, (5) Jalan pedestrian

(Robenstein.H, 1992), (6) Kegiatan pendukung, (7) Tanda-tanda (Broadbent.G, 1980), dan (8) Konservasi (Cohan.N, 1999; Lynch, 1981).

Para Hadirin yang saya muliakan.

**PARADIGMA
BARU
PERANCANGAN
KOTA DI
INDONESIA**

Perancangan kota pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang kota agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan bersifat lestari. Dua hal pokok yang menjadi azas pemanfaatan ruang di Indonesia yakni pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang kota yaitu manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan berada dalam keseimbangan, sehingga aktivitas manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungannya yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanjutan. Kedua, proses pemanfaatan ruang harus bersifat terbuka, efektif, partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Hal tersebut di atas diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomer 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak, terpadu, berdaya guna, dan serasi.



Gb.2 Hubungan Struktur Unsur Kota

Sejalan dengan perkembangan sosial politik di Indonesia, masyarakat menuntut adanya pergeseran pola pikir yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian dituangkan dalam Undang Undang No.32/2004 tentang otonomi daerah. Bergesernya peran pelaku pembangunan dari pemerintah ke masyarakat dan dunia usaha merupakan paradigma baru dalam proses perancangan kota. Perancangan kota yang lebih dikenal dengan istilah Perencanaan Tata Ruang merupakan suatu bentuk kesepakatan publik dan mengikat sebagai suatu kontrak sosial, atau suatu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses politik dan kemudian menjadi kebijakan publik yang harus ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan (Ibrahim, 2000). Paradigma baru Perancangan Kota, harus mempertimbangkan aspek globalisasi, desentralisasi, demokratisasi dan sistem pemerintahan.

a. Globalisasi :

Aspek ini menekankan perancangan yang berorientasi pada integritas dengan kota-kota lain di sekitarnya, yang dapat dijadikan mitra dalam pengembangan, dengan harapan saling mengisi dan menguntungkan. Dan dalam setiap elemen kota yang dikembangkan, harus dipikirkan bagaimana bisa diberdayakan menjadi pemasukan bagi pemerintah kota, sehingga perencana harus berorientasi pada *City Marketing*.

b. Desentralisasi:

Sistem sentralisasi sudah bergeser ke desentralisasi, sehingga Pemerintah pusat sudah tidak lagi menjadi penentu dalam perancangan kota, akan tetapi lebih berperan sebagai mitra dalam memberi saran pemecahan masalah bagi penyelesaian konflik penataan wilayah atau kota antardaerah melalui fasilitasi penyediaan bantuan teknis, norma dan standar, serta pedoman. Pemerintah pusat tidak lagi terlibat secara fisik, kecuali pada tingkat yang lebih makro dan strategis nasional. Dengan demikian pemerintah kota dapat meningkatkan kapasitas manajemen secara optimal, dengan perancangan yang lebih berbasis pada pertumbuhan lokal. Di pihak lain harus senantiasa memprioritaskan peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya

c. Demokratisasi :

Bahwa perancangan kota harus bersifat partisipatif artinya disusun, dilaksanakan, dan dimonitor oleh *Stakeholders* kota secara bersama sama berdasarkan sosial budaya lokal, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan kondisi daerah perencanaan. Singkatnya, bahwa pemberdayaan masyarakat harus lebih diutamakan sehingga hasilnya secara optimal dapat dirasakan dan dinikmati oleh mereka. Sebagai kontrol terhadap

perancangan kota, diperlukan terbentuknya forum/ asosiasi kota seperti Dewan Penasehat Pembangunan Arsitektur dan Kota (DP2K) di kota Semarang

d. Sistem Pemerintahan Yang Bersih:

Pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator dan dapat memberikan citra yang bersih atau *Good Governance*. Oleh karena itu segala kebijakan dan pelayanan umum harus bersifat transparan. Peran Lembaga Legislatif dan petaruh (*stakeholder*) harus dapat mengontrol pembangunan kota itu sendiri.

Para Hadirin yang saya muliakan.

**TIPOLOGI
RUANG PUBLIK**

Dari perkembangan sejarah, ruang publik kota memberi pandangan yang lebih luas tentang bentuk variasi dan karakternya. Pengertian ruang publik secara singkat merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Sikap dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap tipologi ruang kota yang direncanakan. Asesori ruang publik yang harus disediakan semakin berkembang, baik dari segi kualitas desain, bahan dan perawatannya. Misalnya: papan-papan informasi dan reklame, tempat sampah, telpon boks, lampu-lampu, dsb. Tipologi ruang publik ini memiliki banyak variasi yang kadang-kadang memiliki perbedaan yang tipis sehingga seolah-olah memberi pengertian yang tumpang tindih (*overlapping*).

Menurut Stephen Carr (1992) ruang publik dibagi menjadi beberapa tipe dan karakter sebagai berikut.

a. **Taman Umum (*Public Parks*)**

Berupa Lapangan / taman di pusat kota dengan skala pelayanan yang beragam sesuai dengan fungsinya. Tipe ini ada tiga macam yaitu :

- **Taman Nasional (*National Parks*).**
Skala pelayanan taman ini adalah tingkat nasional, lokasinya berada di pusat kota. Bentuknya berupa zona ruang terbuka yang memiliki peran sangat penting dengan luasan melebihi taman-taman kota yang lain, dengan kegiatan yang dilaksanakan berskala nasional. Di samping sebagai *landmark* Kota Jakarta juga dapat sebagai *Landmark* nasional, terutama tugu monumen yang didukung dengan elemen asesori kota yang lain seperti air mancur, jalan pedestrian yang diatur dengan pola-pola menarik, di samping taman dan penghijauan di sekitar kawasan tersebut (Simonds.J.O, 1961).
- **Taman Pusat Kota (*Downtown Parks*)**
Taman ini berada di kawasan pusat kota, berbentuk lapangan hijau yang dikelilingi pohon-pohon peneduh atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru. Areal hijau kota yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan santai dan berlokasi di kawasan perkantoran, perdagangan, atau perumahan kota. Contohnya lapangan hijau di lingkungan perumahan atau perdagangan/perkantoran.
- **Taman Lingkungan (*Neighborhood Parks*)**
Ruang terbuka yang dikembangkan di lingkungan perumahan untuk kegiatan umum seperti bermain anak-anak, olahraga dan bersantai bagi masyarakat di sekitarnya. Contohnya taman di kompleks perumahan.
- **Taman Kecil (*Mini Parks*)**
Taman kecil yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan, termasuk air mancur yang digunakan untuk mendukung suasana taman tersebut. Contohnya taman-taman di sudut-sudut lingkungan/setback bangunan.

b. Lapangan dan Plasa (*Squares and Plazas*)

Merupakan bagian dari pengembangan sejarah ruang publik kota plaza atau lapangan yang dikembangkan sebagai bagian dari perkantoran atau bangunan komersial. Dapat dibedakan menjadi Lapangan Pusat Kota (*Central Square*) dan Plasa pengikat (*Corporate Plaza*).

a) Lapangan Pusat Kota (*Central Square*)

Ruang publik ini sebagai bahan pengembangan sejarah berlokasi di pusat kota yang sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal seperti upacara-upacara peringatan hari nasional, sebagai *rendevous point* koridor-koridor jalan di kawasan tersebut. Di samping untuk kegiatan-kegiatan masyarakat baik sosial, ekonomi, maupun apresiasi budaya. Contohnya adalah alun alun Kota Purworejo (Darmawan, 2003).

b) Plaza Pengikat (*Corporate Plaza*)

Plaza ini merupakan pengikat dari bangunan bangunan komersial atau perkantoran, berlokasi di pusat kota dan pengelolaannya dilakukan oleh pemilik kantor atau pemimpin kantor tersebut secara mandiri.

c. Peringatan (*Memorial*)

Ruang publik yang digunakan untuk memperingati memori atau kejadian penting bagi umat manusia atau masyarakat ditingkat lokal atau nasional, (contoh Tugu pahlawan Surabaya, Tugu Muda Semarang).

d. Pasar (*Markets*)

Ruang terbuka atau ruas jalan yang dipergunakan untuk transaksi biasanya bersifat temporer atau hari tertentu. Contoh : kegiatan pasar *krempyeng* (sementara) yang berlokasi di depan Java Mall dan pasar Peterongan Semarang diwaktu fajar.

e. **Jalan (*Streets*)**

Ruang terbuka sebagai prasarana transportasi. Menurut Stepen Carr (1992) dan Rubeinstein.H (1992) tipe ini dibedakan menjadi Pedestrian Sisi Jalan (*Pedestrian Sidewalk*), Mal Pedestrian (*Pedestrian Mall*), Mal Transit (*Mall Transit*), Jalur Lambat (*Traffic Restricted Streets*) dan Gang Kecil Kota (*Town Trail*).

a) **Pedestrian sisi jalan (*Sidewalk Pedestrian*)**

Bagian ruang publik kota yang banyak dilalui orang yang sedang berjalan kaki menyusuri jalan yang satu yang berhubungan dengan jalan lain. Letaknya berada di kiri dan kanan jalan.

b) **Mal Pedestrian (*Pedestrian Mall*)**

Suatu jalan yang ditutup bagi kendaraan bermotor, dan diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Fasilitas tersebut biasanya dilengkapi dengan asesori kota seperti pagar, tanaman, dan berlokasi di jalan utama pusat kota. Contoh : Harajaku depan stasiun TV NHK Jepang setiap hari Minggu pagi.

c) **Mal Transit (*Transit Mall*)**

Pengembangan pencapaian transit untuk kendaraan umum pada penggal jalan tertentu yang telah dikembangkan sebagai pedestrian area.

d) **Jalur Lambat (*Traffic Restricted Streets*)**

Jalan yang digunakan sebagai ruang terbuka dan diolah dengan desain pedestrian agar lalu lintas kendaraan terpaksa berjalan lamban, disamping dihiasi dengan tanaman sepanjang jalan tersebut atau jalur jalan sepanjang jalan utama yang khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan bukan bermotor.

e) **Gang Kecil (*Town Trail*)**

Gang-gang kecil ini merupakan bagian jaringan jalan yang menghubungkan ke berbagai elemen kota satu

dengan yang lain yang sangat kompak. Ruang publik ini direncanakan dan dikemas untuk mengenal lingkungan lebih dekat lagi. Contoh : kawasan wisata Brugess di Belgia atau kawasan Menara Kudus (Darmawan, 2003; Rubeinstein.H, 1992)

f. Tempat Bermain (*Playground*)

Ruang publik yang berfungsi sebagai arena anak-anak yang dilengkapi dengan sarana permainan, biasanya berlokasi di lingkungan perumahan. Tipe ini terdiri dari Tempat Bermain (*Playground*) atau Halaman Sekolah (*Schoolyard*). (Darmawan, 2005; Simonds.J.O, 1961)

- **Tempat Bermain (*Playground*)**

Ruang publik ini berlokasi di lingkungan perumahan, dilengkapi peralatan tradisional seperti papan luncur, ayunan, dan fasilitas tempat duduk, disamping dilengkapi dengan alat permainan untuk kegiatan petualangan.

- **Halaman Sekolah (*Schoolyard*)**

Ruang publik halaman sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pendidikan lingkungan atau ruang untuk melakukan komunikasi.

g. Ruang Komunitas (*Community open space*)

Ruang kosong di lingkungan perumahan yang didesain dan dikembangkan serta dikelola sendiri oleh oleh masyarakat setempat. Ruang komunitas ini berupa taman masyarakat (*Community Garden*). Ruang ini dilengkapi dengan fasilitas penataan taman termasuk gardu pemandangan, areal bermain, tempat-tempat duduk dan fasilitas estetis lain. Ruang ini biasanya dikembangkan di tanah milik pribadi atau tanah tak bertuan yang tidak pernah dirawat (Cullen, 1986).

h. Jalan Hijau dan Jalan Taman (*Greenways and Parkways*)

Merupakan jalan pedestrian yang menghubungkan antara tempat rekreasi dan ruang terbuka, yang dipenuhi dengan taman dan penghijauan.

i. Atrium/Pasar di Dalam Ruang (*Atrium/Indoor Market Place*)

Tipe ini dibedakan menjadi dua yaitu atrium dan pasar/ pusat perbelanjaan di pusat kota (*Market Place/ downtown shopping center*) (Darmawan, 2005).

- **Atrium**

Ruang dalam suatu bangunan yang berfungsi sebagai atrium, berperan sebagai pengikat ruang-ruang di sekitarnya yang sering digunakan untuk kegiatan komersial dan merupakan pedestrian area. Pengelolaannya ditangani oleh pemilik gedung atau pengembang/investor.

- **Pasar/pusat perbelanjaan di pusat kota (*market place/ downtown shopping center*).**

Biasanya memanfaatkan bangunan tua yang kemudian direhabilitasi ruang luar atau ruang dalamnya sebagainya, ruang komersial. Kadang-kadang dipakai sebagai festival pasar dan dikelola sendiri oleh pemilik gedung tersebut.

j. Ruang di Lingkungan Rumah (*Found/Neighborhood Spaces*)

Ruang publik ini merupakan ruang terbuka yang mudah dicapai dari rumah, seperti sisa kapling di sudut jalan atau tanah kosong yang belum dimanfaatkan dapat dipakai sebagai tempat bermain bagi anak-anak atau tempat komunikasi bagi orang dewasa atau orang tua.

k. *Waterfront*

Ruang ini berupa pelabuhan, pantai, bantaran sungai, bantaran danau atau dermaga. Ruang terbuka ini berada di sepanjang rute aliran air di dalam kota yang dikembangkan sebagai taman untuk waterfront (Torre.L.A, 1989).

Para Hadirin yang saya muliakan.

Kriteria desain tak terukur merupakan kriteria yang lebih menekankan pada aspek kualitatif di lapangan. Kriteria ini sering dipakai dalam penelitian kualitatif, untuk mengukur suatu kualitas lingkungan kota. Menurut Shirvani.H(1985:57), ada 6 kriteria desain tak terukur antara lain:

**KRITERIA
DESAIN TAK
TERUKUR
(UNMEASURABLE
DESIGN
CRITERIAS)**

a. Pencapaian (*access*)

Access memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pengguna untuk mencapai tujuan dengan sarana dan prasana transportasi yang mendukung kemudahan aksesibilitas yang direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Fasilitas untuk aksesibilitas ini hendaknya dalam perencanaan dan perancangannya memperhatikan tatanan, letak, dan sirkulasi, dimensi (Lynch, 1976).

b. Kecocokan (*compatible*)

Kecocokan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan lokasi, kepadatan, skala dan bentuk masa bangunan.

c. Pemandangan (*view*)

Pemandangan berkaitan dengan aspek kejelasan yang terkait dengan orientasi manusia terhadap bangunan. *View* dapat berupa *landmark*. Nilai visual ini dapat diperoleh dari skala dan pola serta warna, tekstur, tinggi dan besaran.

d. Identitas (*identity*)

Identitas adalah nilai yang dibuat atau dimunculkan oleh objek (bangunan/manusia) sehingga dapat ditangkap dan dikenali oleh indera manusia. *Identity* dikenal juga dengan citra (Darmawan, 2003).

e. Rasa (*sense*)

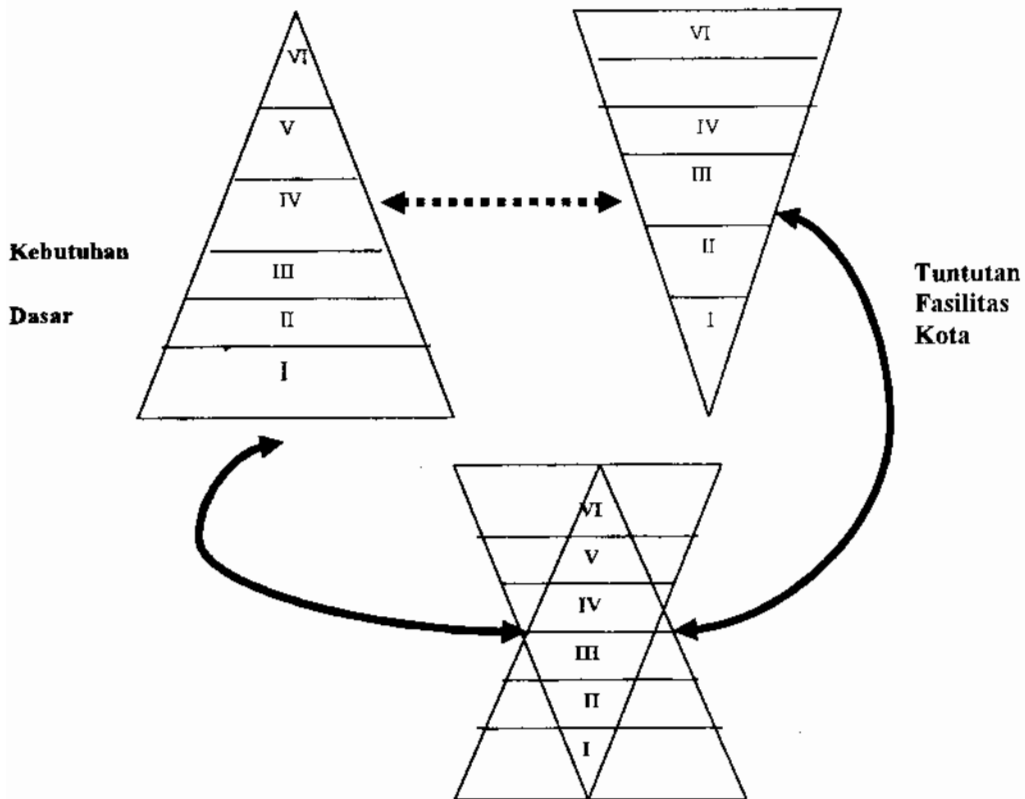
Rasa kesan atau suasana yang ditimbulkan. *Sense* ini biasanya merupakan simbol karakter dan berhubungan dengan aspek ragam gaya yang disampaikan oleh individu/kelompok bangunan atau kawasan (Lynch.K, 1976; Steele.F, 1981).

f. Kenyamanan (*livability*)

Kenyamanan adalah kenyamanan untuk tinggal atau rasa kenyamanan untuk tinggal atau *beraktivitas* di suatu kawasan/obyek (Darmawan, 2003).

Dari kriteria desain tak terukur di atas dapat diartikan bahwa persepsi setiap individu atau kelompok masyarakat akan menuntut kebutuhan fasilitas kota yang berlainan pula, tergantung hirarki sosial ekonomi masyarakat pengguna kota. Menurut Frey. H (1999) kriteria yang dapat mendorong kesinambungan bentuk dan struktur kota diperbandingkan antara kebutuhan dasar manusia menurut hirarki Maslow dan tuntutan kebutuhan fasilitas umum kota. Gambar di bawah ini merupakan hubungan dan perpaduan antara kebutuhan dasar manusia dengan 6 (enam) tingkatan menurut Maslow dari tuntutan fasilitas kebutuhan kota yang berbanding terbalik, digambarkan dengan 2 (dua) segitiga seperti gambar dibawah ini. Pada hirarkhi I digambarkan sebagai Komunitas terbesar yang bergerak semakin kecil pada tingkatan ke 6 (enam). Sebaliknya tuntutan komunitas I kecil digambarkan dengan segitiga terbalik, semakin keatas sampai dengan No.6 (enam) semakin banyak tuntutan kebutuhan fasilitas kotanya. Secara

rinci akan diperjelas dengan Tabel.1. Hirarki Kebutuhan Dasar Manusia dan Pengadaan Fasilitas Kotanya.



Sumber: Darmawan, 2005

Gb.3 Hubungan Kebutuhan Dasar Manusia dan Tuntutan Fasilitas Kota

Tabel.1 Hirarki Kebutuhan Dasar Manusia dan Pengadaan Fasilitas Kota:

Kebutuhan Dasar Manusia dari Hirarkhi Maslow.		Fasilitas umum Kota yang seharusnya disediakan.
I Tersedia semua fasilitas kebutuhan fisik. (<i>Provision for all physical needs</i>)	→	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat tinggal & pekerjaan ○ Sekolah & tempat pelatihan ○ Transportasi & komunikasi umum ○ Aksesibilitas ke fasilitas pelayanan umum
II Nyaman, aman & perlindungan. (<i>Safety, security and protection</i>)	→	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penataan visual & fungsi bangunan & kontrol terhadap lingkungan ○ Tempat yang bebas terhadap polusi & kebisingan ○ Tempat yang bebas dari keramaian orang
III Suatu sarana lingkungan sosial yang kondusif. (<i>A conducive social environment</i>)	→	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat yang dapat untuk berinteraksi dengan tetangga ○ Merasa memiliki masyarakat sendiri di suatu tempat
IV Suatu image yang baik, reputasi & prestise. (<i>A good image, reputation and prestige</i>)	→	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat yang memiliki rasa percaya diri yang kuat bagi lingkungan ○ Status & kebanggaan ○ Memberi peluang bagi tiap individu untuk membentuk personal space
V Ada kesempatan menciptakan kreativitas (<i>A chance to be creative</i>)	→	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kesempatan untuk berkomunikasi membentuk lingkungan mereka sendiri
VI Lingkungan nyaman yang estetis (<i>An aesthetically pleasing environment</i>)	→	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat dengan design estetis & menyenangkan ○ Tempat yang secara fisik memberi kesan yang mendalam ○ Kota yang merupakan tempat yang syarat dengan nilai budaya dan karya seni tinggi.

Sumber: Hidler, B dalam Darmawan, 2005

Pergeseran status sosial masyarakat karena keberhasilan masyarakat menyebabkan perubahan tuntutan kebutuhan fasilitas (lihat gb.3).

Dengan demikian maka terjadi pula perubahan gaya hidup, kemudian akan terjadi pula pengembangan fasilitas pelayanan yang meningkat pula. Hal tersebut yang sering menyebabkan perubahan wajah lingkungan kota yang cenderung semakin padat, karena ketersediaan tanah yang tetap tidak berubah dimensinya. Ini berarti diperlukan pemikiran proyeksi ke depan untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

Para Hadirin yang saya muliakan.

**KONSEP DASAR
PERANCANGAN
RUANG PUBLIK**

Tatanan ruang (*order*) publik merupakan sesuatu yang memiliki ukuran yang tepat, semua bagian harus cocok dengan bagian yang lain, misalnya bagian sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, bagian yang rendah dengan bagian yang lebih tinggi, dengan susunan material yang berlainan, akan tetapi masih dalam suatu areal dan garis sumbu yang sama. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan ruang publik adalah:

a) Kasatuan (*Unity*)

Menurut Norberg-Schulz (1971) dalam Moughtin.C, 1992 mengemukakan konsepnya, bahwa pertama kali yang dipikirkan dalam mendesain adalah pusat-pusat lokasi kegiatan (*proximity*), arah dan tujuan jalan (*continuity*), dan area yang terlingkupi (*enclosure*). Komposisi dalam perancangan kota adalah seni, kesatuan visual masing-masing elemen kota dengan menghindarkan semaksimal mungkin adanya perbedaan. Kembali kepada tujuan perancangan kota yang terpenting adalah menciptakan image kota yang kuat dalam struktur kota yang memiliki visual dan penataan organisasi ruang yang menyatu (Lynch.K, 1960).

b) Proporsi (*Proportion*)

Metode untuk menyusun tatanan ruang (*order*) yang menyatu (*unity*) dapat menggunakan metode proporsi dengan memberikan keseimbangan komposisi elemen-elemennya (Ching.D.K, 1979). Beberapa contoh proporsi antara lain suatu rumah tinggal dengan proporsi jendela yang sama bentuk dan dimensinya antara sebelah kiri dengan sebelah kanan bisa dikatakan simetri. Pintu utama sebagai elemen bangunan rumah tinggal atau apartemen dibuat pada dinding masif secara detail dan dikaitkan dengan elemen lain, maka akan membentuk proporsi. Dalam skala kota kita dapat melihat proporsi melalui penampakan garis langit (*skyline*), bangunan mana yang menjadi *landmark* nya dan bagaimana komposisi dengan bangunan lain akan nampak pada *shilouete* kota tersebut (Spreiregen.P.D, 1965).

c) Skala dan Proporsi (*Scale and Proportion*)

Untuk objek dua dimensional seperti patung atau *sculpture* di tengah taman, pengertian proporsi ditentukan oleh faktor ketinggian dan lebar. Definisi proporsi kaitannya dengan penataan ruang publik berupa taman kota sedikit lebih kompleks, karena berhubungan dengan bagian struktur kota secara sinergis. Dengan kata lain sistem proporsi dapat diterapkan pada ruang publik sebagai bagian dari struktur kota secara keseluruhan. Perbedaan skala dan proporsi tergantung dari perbandingan dari dimensi dan proporsi ruang yang satu dengan yang lain (Cliff Moughtin, 1992).

d) Harmoni (*Harmony*)

Adanya sinkronisasi dan keserasian antara beberapa unsur yang berbeda, tetapi dapat tercipta suatu model atau gaya yang harmonis (Ching.D.K, 1979).

e) Simetri, Keseimbangan (*Symmetry, Balance*)

Simetri merupakan suatu penataan atau susunan elemen untuk mencapai komposisi yang lebih *rigid*. Kemudian kalau dikaitkan dengan keseimbangan (*balance*) menjadi salah satu ekspresi yang sederhana dan jelas dalam perancangan. Ada komentar bahwa sentuhan proporsi (*a sense of proportion*) dan pandangan yang seimbang (*balance outlook*) merupakan dua faktor yang dapat memberikan nilai tambah dalam desain. Simetri formal (*formal symmetry*), hal ini merupakan satu tipe keseimbangan yang mudah dilihat dan dimengerti, tetapi menimbulkan kesulitan dalam menyelaraskan antara fungsi ruang dalam dan ruang luar.

f) Ritme, Harmoni, dan Kontras (*Rhythm, Harmony, Contrasts*)

Ritme dalam ruang publik kota seperti halnya properti yang dijelaskan dengan analisis-analisis yang dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu merupakan produk kelompok-kelompok elemen seperti suatu penonjolan, ruang antara, aksent dan arah menuju suatu objek yang dapat ditunjukkan dengan deretan kolom-kolom atau pohon atau elemen lain sebagai pengarah. Keberhasilan desain ruang publik kota dari segi estetis apabila dapat menghindari kemonotonan, memiliki daya tarik dan aksentuasi. Beberapa ruang publik yang menyenangkan ditunjukkan dari bentuk-bentuk kontras yang berasal dari alam, sinar matahari dan bayangan (Ching.D.K, 1979)

Harmoni dalam komposisi ruang publik kota merupakan upaya konfirmasi untuk mencapai konsistensi melalui beberapa pangulangan dari material, detail-detail tinggi rendah sebagai sentuhan dalam proses menciptakan kekompakan dalam menata komposisi kota (Ching.D.K, 1979; Sprcridgen.P.D, 1965).

Kontras dalam ruang publik kota merupakan pemanfaatan semaksimal mungkin lahan yang terbatas dengan unsur-unsur bentuk dan anti bentuk, bangunan dan ruang, jalan dan ruang terbuka publik, lansekap dengan perangkat keras dan lunak. Tanpa elemen-elemen yang kontras dan kejutan-kejutan, maka yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan yang membosankan (Ching.D.K, 1979; Spreiregen.P.D, 1965).

Para Hadirin yang saya muliakan.

**MANAJEMEN
RUANG PUBLIK**

Manajemen ruang publik kota merupakan pengamatan tentang bagaimana orang menggunakan semua bentuk ruang publik seperti jalan, taman, plasa, fasilitas transportasi umum. Dari dulu para desain lebih memperhatikan masalah desain ruang publik secara fisik semata (Shirvani.H, 1985). Padahal kalau kita mau memperhatikan aspek manajemen akan memperoleh nilai lebih secara cepat. Bagaimana menciptakan ruang publik tersebut menjadi hidup (*lively*), lebih nyaman, aman dan menyenangkan. Pengelola pusat keramaian (*downtown area*) seharusnya mengerti bagaimana menciptakan keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan suasana hidup menarik para pengunjung. Secara rutin harus dirawat dan dibersihkan, memiliki tim keamanan atau satpam yang tangguh tetapi bersahabat, menawarkan makanan kecil sambil berbelanja yang lain, sering mengadakan pertunjukkan-pertunjukkan, promosi-promosi, menyediakan *sitting group*, dimungkinkan adanya air mancur dan kenyamanan yang lain.

Kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan Manajemen Ruang Publik ? Ada tiga aspek penting dari manajemen ruang publik yang dipakai di *Rockefeller Center USA* dalam Project for Public Spaces. Inc, 1994 sbb.

1. Memperhatikan pelayanan terhadap kota dalam hal perawatan (*maintenance*), Keamanan (*Security*) dan manajemen transportasi (*Transportation Management*).
2. Menciptakan suatu pasar di pusat kota yang menarik dengan toko penjual eceran yang berkualitas, program kegiatan, acara-acara, promosi-promosi, pedagang kaki lima, pasar petani dan *coffee shops*.
3. Senantiasa meningkatkan desain ruang ruang publik, termasuk pengembangan desain secara menyeluruh untuk menjamin terintegrasinya fungsi ruang menjadi menerus, disamping meningkatkan ruang publik yang lain seperti pelebaran trotoar, tempat duduk, pohon-pohon, informasi kios-kios.

Didalam pendekatan manajemen diperlukan persyaratan minimal meliputi antara lain (Darmawan, 2005):

1. Harus ada yang bertanggung jawab untuk memastikan ruang ruang publik seperti plasa, jalan atau mal dalam keadaan yang baik dan menyenangkan bagi pengunjung yang datang memerlukan tempat tersebut.
2. Seluruh detail elemen yang ada harus senantiasa bersih, terawat, aman, dan nyaman setiap hari.
3. Ruang publik harus dibuat menarik, aktif, dapat meningkatkan spontanitas dan daya tarik bagi pengunjung di tempat tersebut.
4. Harus ada orang yang senantiasa memantau ruang publik tersebut untuk memastikan bahwa perubahan desain yang dibuat akan mendapat respon yang baik bagi pengunjung seperti lokasi tempat duduk, jadwal perawatan atau cara-cara pengamanan.

Yang menjadi catatan penting bahwa manajemen kegiatan di beberapa kota seharusnya diteliti agar berbagai kegiatan yang diselenggarakan akan mencapai keberhasilan.

a. Program Perawatan Ruang Publik.

Untuk perawatan ruang publik dengan biaya murah harus dapat bekerja sama dengan para pedagang dan pemilik properti. Dengan kerjasama tersebut, biaya perawatan akan menjadi ringan. Para pedagang dan pemilik properti akan berhubungan dengan perawatan terhadap zona kerja mereka.

Cara lain untuk perawatan dengan biaya murah termasuk memindahkan tempat tempat sampah, perubahan waktu terhadap kebersihan jalan dan lingkungan dan pengambilan sampah, meningkatkan bisnis dengan memanfaatkan label sponsor pada fasilitas tempat sampah sekaligus untuk menambah keindahan tempat tersebut. Beberapa organisasi pengelolaan pusat kota menghabiskan waktu berpikir untuk memperbaiki agar lebih baik tentang peraturan sanitasi kota dan meningkatkan pelayanan kota.

b. Keamanan

Masalah keamanan pusat kota sangat erat hubungannya dengan kriminologi. Pusat Kota dikatakan aman dan nyaman kalau pengunjung merasa nyaman berbelanja atau bekerja dan para pelaku bisnis percaya diri dalam melakukan aktivitasnya. Program keamanan pusat kota harus berhubungan dengan kedua aspek yakni masalah kriminal yang terjadi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi orang tentang kriminal dan kenyamanan. Sering terjadi suatu kawasan pusat kota menjadi kosong, gelap, kurang petugas keamanannya yang berpengaruh terhadap orang berbelanja maupun pegawai yang bekerja di toko-toko tersebut.

Untuk mengatasi masalah keamanan tersebut biasanya dengan ditambah polisi patroli / satpam yang berjalan kaki dilokasi yang diamankan. Anehnya dalam penelitian, usaha tersebut tidaklah mengurangi jumlah kriminal (Project for

Public Spaces.Inc, 1994). Akan tetapi keberadaan patroli polisi yang berjalan kaki dilokasi kota dapat memberi rasa aman bagi pengunjungnya. Banyak program strategi dalam menjaga keamanan dipusat kota. Kategori Program utama antara lain menekan keamanan bagi swasta atau umum, restrukturisasi atau penempatan pelayanan patroli keamanan, pengamatan keamanan bangunan dan penelitian ulang desain lingkungan merupakan program kegiatan dan informasi bagi umum untuk mencegah kriminalitas.

c. Peningkatan Perancangan Ruang Publik

Peningkatan perancangan dan manajemen areal pusat kota membutuhkan penanganan yang baik. Strategi manajemen dalam perubahan perancangan ruang publik meliputi dua aspek yakni:

- ↓ Review perancangan pengembangan areal utama pusat kota.
- ↓ Peningkatan perancangan jalan-jalan, trotoar, taman taman dan plasa.

Tugas utama bagi pengelola kota adalah pengembangan ekonomi yang pada umumnya mendorong dan menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan bangunan fasilitas pelayanan umum seperti: kantor baru, proyek perumahan, pusat perbelanjaan, tempat parkir, hotel, fasilitas-fasilitas kebudayaan.

Review desain merupakan salah satu proses desain bangunan baru atau rehabilitasi bangunan lama untuk menjaga agar dapat mempertahankan nilai properti tetap stabil/meningkat dibanding dengan properti yang ada di sekitarnya. Bangunan tersebut harus tetap memiliki karakter, berfungsi dan terintegrasi dengan pengembangan areal pusat kota secara menyeluruh.

Organisasi swasta dapat memainkan peran dalam proses evaluasi dan memanfaatkan peluang pengembangan inovatif di area tersebut.

Sebaliknya organisasi sektor swasta tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan pemda setempat, untuk mendapatkan legalitas dalam proses review bangunan di lokasi tersebut.

d. Peningkatan Kualitas Ruang Publik

Peningkatan kualitas ruang publik tidak cukup hanya dengan merenovasi jalan, menambah tanaman ataupun pohon. Akan tetapi ada beberapa faktor lain yang mendasari perencanaan peningkatan kualitas ruang publik, salah satu diantaranya adalah faktor kenyamanan.

Faktor kenyamanan menjadi penting karena dapat memberi kenikmatan bagi para pengguna faktor kenyamanan dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas-fasilitas pada ruang publik seperti: tempat-tempat duduk yang terlindung dari sinar matahari, tempat-tempat pemberhentian yang nyaman untuk menunggu bus dsb. Kenyamanan juga bisa dicapai dengan melakukan pelebaran trotoar yang ada sesuai dengan kebutuhan (Shirvani.H, 1985).

Faktor Pencapaian menuju tempat umum sangat penting terutama bagi pejalan kaki atau pemakai kendaraan bermotor. Misalnya, *transit mall* yang mempermudah orang menyeberang jalan dan memperlancar sirkulasi kendaraan/ bus (Rubeinstein.H, 1992).

Vitalitas artinya bahwa ruang publik seharusnya lebih diramaikan dengan adanya cafe, pedagang kaki lima, dan kegiatan lain yang menggunakan ruang publik misalnya festival-festival yang akan menghidupkan suatu kawasan (Lynch.K, 1972).

Image dapat diciptakan sesuai keinginan perencana atau pengelola dengan menampilkan elemen-elemen yang dapat memberi kesan khusus sehingga dapat menarik para pengunjung (Shirvani.H, 1985; Lynch.K, 1960).

Ruang publik memiliki peran dan fungsi penting bagi kegiatan masyarakat di perkotaan. Oleh karena itu penanganan ruang publik seharusnya mendapat perhatian tersendiri dan terus menerus serta selalu ditingkatkan kualitasnya agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat penghuni kota, baik secara fisik maupun apresiasi-apresiasi. Dengan demikian kota dapat semakin hidup (*lifelxy city*) dan berkembang. Sehingga diperlukan partisipasi dari berbagai pihak diperlukan dalam hal ini, sehingga peningkatan kualitas ruang publik tidak bergantung pada pemerintah kota saja, tetapi seluruh unsur masyarakat, dan lembaga-lembaga lain seperti lembaga/ organisasi profesi, asosiasi-asosiasi pengusaha dan industri, pers, pakar-pakar, LSM, dan pemerhati kota.

Para Hadirin yang saya muliakan.

Dalam menilai kualitas ruang publik kota terdapat 8 elemen penting yang digambarkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, bentuk bentuk fisik bangunan atau asesori kota lainnya hingga pada manajemen pengelolaannya (Tibbalds, 1993).

**PENINGKATAN
KUALITAS
RUANG PUBLIK
KOTA**

1. Aktivitas dan Fungsi Campuran

Masyarakat kota dalam melakukan aktivitasnya lebih memilih tempat yang fasilitasnya memiliki fungsi campuran. Sehingga hampir diberbagai kota didunia mendesain kotanya dengan *Mixed Use* konsep.

2. Ruang Publik dan Ruang Khusus.

Ruang publik dengan pengertian yang luas memiliki arti penting bagi masyarakat, sebagai area komunikasi, tempat

kencan, tempat apresiasi dan rekreasi, area komersial, pedagang kaki lima, tempat demo mengemukakan pendapat dsb. Penyediaan ruang publik merupakan faktor penting untuk membuat ruang kota menjadi hidup (*lively*) (Krier.R, 1979)

3. Pergerakan dan Keramahan Pedestrian.

Pedestrian area atau jalan pedestrian merupakan faktor penting untuk mengantisipasi pergerakan orang dari satu fasilitas publik ketempat lainnya. Fasilitas ini dulu diabaikan, sekarang sudah mulai di perhitungkan karena mengandung nilai kualitas lingkungan yang baik dan harus didesain sesuai citra kawasan (Rubeinstein.H, 1992)

4. Skala Manusia dan Kepadatan.

Suatu desain harus memikirkan skala manusia agar lebih manusiawi, keterlingkupan (*enclosure*) yang lebih erat, asesori kota (*townscape*) yang lebih menarik, utilitas kota yang berfungsi dengan baik. Intinya semua aspek dirancang lebih manusiawi dan aksesibel bagi penyandang cacat sekalipun. Kepadatan merupakan kondisi yang tidak seimbang antara fasilitas yang tersedia dan masyarakat yang menggunakannya (Spreiregen.P.D, 1962; Cullen.G, 1996).

5. Struktur, Kejelasan dan Identitas.

Sebelum kita memulai perencanaan secara integral, kita wajib mengenali struktur kawasan kota yang akan dirancang, axis mana yang perlu dikembangkan, ruang terbuka mana yang bisa dipakai sebagai rendezvous point, bagaimana mengatur aksesibilitasnya. Hal ini untuk kejelasan manajemen transportasi kawasan terhadap kota. Identitas merupakan unsur penting yang dapat menarik perhatian dikawasan revitalisasi, karena orang akan mudah terkesan dan selalu ingat apa yang pernah dilihat (Lynch.K, 1962; Kohan.N, 1999)

6. Kerapian, Keamanan dan Kenyamanan.

Kerapian yang menyangkut infrastruktur, bangunan, utilitas dan asesori kota merupakan faktor penting yang sering diabaikan oleh pengelolaan kota, sehingga banyak keluhan masyarakat karena merasa tidak nyaman terganggu dan tidak aman (Shirvani.H, 1996)

7. Manajemen Kota

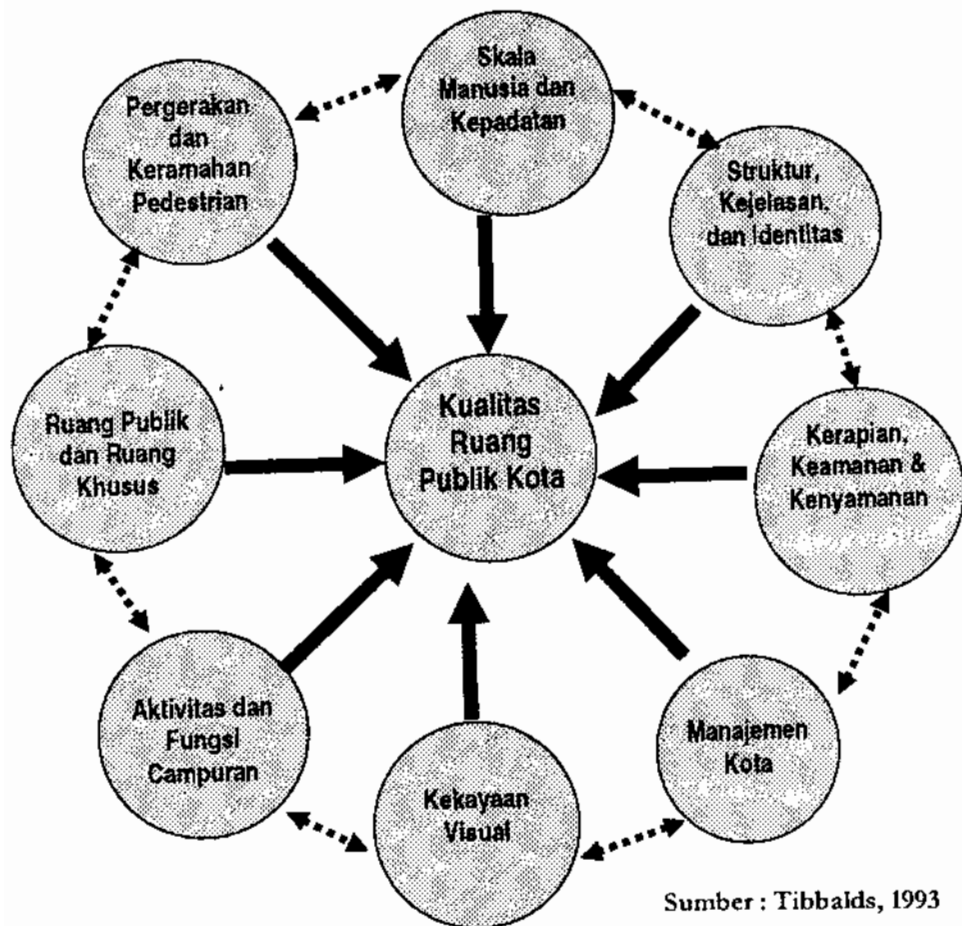
Manajemen suatu kota sering tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab, siapa pula yang berperan menggerakkan masyarakat menyadari akan partisipasi terhadap pengelolaan kota. Peran *Stakeholder* sangat penting dalam manajemen kota, karena beban ini tidak dapat sepenuhnya diberikan pada Pemerintah Kota karena berbagai keterbatasan (Huat.C.B & Edwards.N, 1992)

8. Kekayaan Visual

Beragam visual menarik yang ada dikawasan revitalisasi sangat diperlukan untuk menambah nilai pemandangan (*vista*) yang dapat meningkatkan daya tarik dan nilai estetika kawasan menjadi berkualitas (Cullen.G, 1996).

Kedelapan elemen tersebut satu dengan yang lain saling berinteraksi dan mendukung, semakin tinggi kualitas elemen-elemen tersebut semakin bagus kualitas ruang publiknya. Selanjutnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Diagram 1: Keterkaitan Antara Elemen Kualitas Lingkungan Kota



Sumber : Tibbalds, 1993

Para Hadirin yang saya muliakan

**PROSES DESAIN
RUANG PUBLIK
DALAM
PERANCANGAN
KOTA**

Di dalam Penyusunan Perancangan Kota di Indonesia dikenal dengan istilah RTRK yang merupakan penjabaran dari RDTRK dan rujukan pelaksanaan Pembangunan. Rencana lain yang sama hirarkinya dengan RTRK yakni RTBI, yang berisi rumusan tentang rencana tapak pemanfaatan ruang kawasan;

prarencana teknik jaringan utilitas; prarencana teknik jaringan jalan; prarencana teknik bangunan gedung baik tata letak, penampang dan arsitektur lingkungan bangunan dan gedung; prarencana bukan bangunan yang sering dikenal dengan ruang publik. Dalam penyusunan Ruang Publik sebagai bagian dari Rencana Teknis Ruang Kota membutuhkan suatu proses yang sistematis, seperti uraian dibawah ini.

Proses Perencanaan Penyusunan RTRK ini didesain oleh pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- o Adanya indikasi permasalahan pembangunan dan lingkungan pada blok-blok peruntukan yang perlu dipenanganannya.
- o Adanya permasalahan perwujudan keharmonisan bangunan dengan lingkungan setempat dalam rangka kegiatan pembangunan pada blok-blok peruntukan.

Sehingga dalam praktek diperlukan suatu proses penyusunan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan
 - o Persiapan penganggaran meliputi antara lain perumusan-perumusan mengenai sumber dana, pemrakarsa, penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan.
 - o Persiapan administrasi, meliputi penyusunan surat-surat keputusan, struktur organisasi pelaksanaan yang melibatkan unsur-unsur terkait administrasi proyek.
 - o Persiapan teknis yaitu meliputi perumusan substansi, mekanisme/proses dan produk rencana serta penyusunan kerangka acuan kerja.
- a) Tahap Pengumpulan Data
 - 1. Pelaksanaan survey
 - Pelaksanaan survey untuk mendapatkan data sekunder dan data primer atau menguji validitas data.

2. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan meliputi:

Pengumpulan data dilakukan dengan *check list* data maupun observasi lapangan.

- o Kebijakan dan rencana tata ruang (RUTRK, RDTRK, dan studi terkait)
- o Kondisi sosial budaya
- o Kondisi ekonomi dan investasi
- o Sumber daya buatan, prasarana dan sarana dasar, kondisi bangunan dan non bangunan.
- o Fisik dasar/unsur alamiah (Topografi)
- o Kondisi tata lingkungan dan tata penghijauan
- o Kelembagaan dan sistem pengelolaan/pengendalian pembangunan.

b) Tahap Analisis Kawasan/Lingkungan

1. Analisis Fisik Dasar:

Analisis fisik dasar antara lain meliputi topografi, daya dukung dan kepadatan bangunan.

2. Analisis Tapak:

Analisis tapak antara lain meliputi: lokasi pengembangan, orientasi massa bangunan, keserasian lingkungan dan bangunan, analisis ruang hijau dan penghijauan.

3. Analisis Pelestarian Lingkungan:

Analisis ini meliputi sumber daya air, pelestarian flora dan fauna, pelestarian tanah dan udara, analisis sosial budaya setempat.

4. Analisis Massa Bangunan dan non bangunan:

Analisis ini meliputi keterkaitan-keterkaitan antar massa bangunan, besaran bangunan, jenis dan tipe bangunan.

5. Analisis terhadap kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman:
Analisis ini antara lain meliputi jenis dan besaran sarana dan prasarana lingkungan.
 6. Analisis sosial kebudayaan:
Analisis ini sebagai bahan masukan terhadap jenis dan tipe bangunan dan orientasi massa bangunan.
- c) Identifikasi Potensi dan Persoalan, Serta Perkiraan Kebutuhan
- Perumusan mengenai potensi dan persoalan kawasan/ lingkungan didasari oleh:
- o Hasil analisis kawasan/lingkungan yang telah dilakukan.
 - o Sasaran-sasaran pembangunan kawasan/lingkungan yang hendak dicapai.
- Perumusan potensi kawasan/lingkungan antara lain meliputi: lahan-lahan yang dapat dibangun/ dikembangkan karena memenuhi persyaratan fisik pembangunan, sumber daya air yang bisa diolah untuk kebutuhan air baku kawasan/lingkungan, kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat sebagai pertimbangan dalam penataan jenis dan tipe bangunan dan orientasi massa bangunan, sarana dan prasarana lingkungan yang telah dibangun/tersedia, ditinjau dari sistem primer, sekunder (sistem makro yang terkait dengan kawasan/lingkungan). Perumusan persoalan kawasan/lingkungan, antara lain mengemukakan persoalan penanganan lingkungan baik tanah, air, flora dan fauna; persoalan sosial/kependudukan, keserasian bangunan lingkungan sosial budaya/kependudukan. Perkiraan kebutuhan pembangunan kawasan/ lingkungan meliputi:

- o Perkiraan bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal.
 - o Perkiraan ruang hijau.
 - o Perkiraan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- d) Formulasi Strategi Penanganan Pembangunan Kawasan/Lingkungan:
Perumusan strategi penanganan pembangunan kawasan meliputi:
- o Strategi kependudukan.
 - o Strategi pengelolaan pembangunan kawasan yang menjadi tanggungjawab swasta, masyarakat dan pemerintah daerah.
 - o Strategi pembangunan terhadap pelestarian lingkungan.
- e) Perumusan Rencana Teknis Ruang
Rumusan Rencana Teknis Meliputi:
- o Rencana tapak pemanfaatan ruang yang meliputi rencana perpetakan, tata letak bangunan.
 - o Arahkan letak dan penampang jaringan jalan.
 - o Arahkan letak dan penampang jaringan utilitas.
 - o Rencana tata bangunan dan lingkungan.
 - o Rencana tapak dan tata letak bangunan bukan gedung.
 - o Rencana ruang hijau dan penghijauan.

Proses perencanaan dapat dilihat dari diagram yang menjelaskan proses Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kota/Perkotaan (Diagram.3)

Keluaran (*output*) produk Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kota, kalau diperhatikan sebagian besar merupakan arahan dari rencana ruang-ruang publik kota yang terintegrasi dengan rencana-rencana yang lebih makro di atasnya (diagram.2)

Diagram 2: Bagan Alir Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

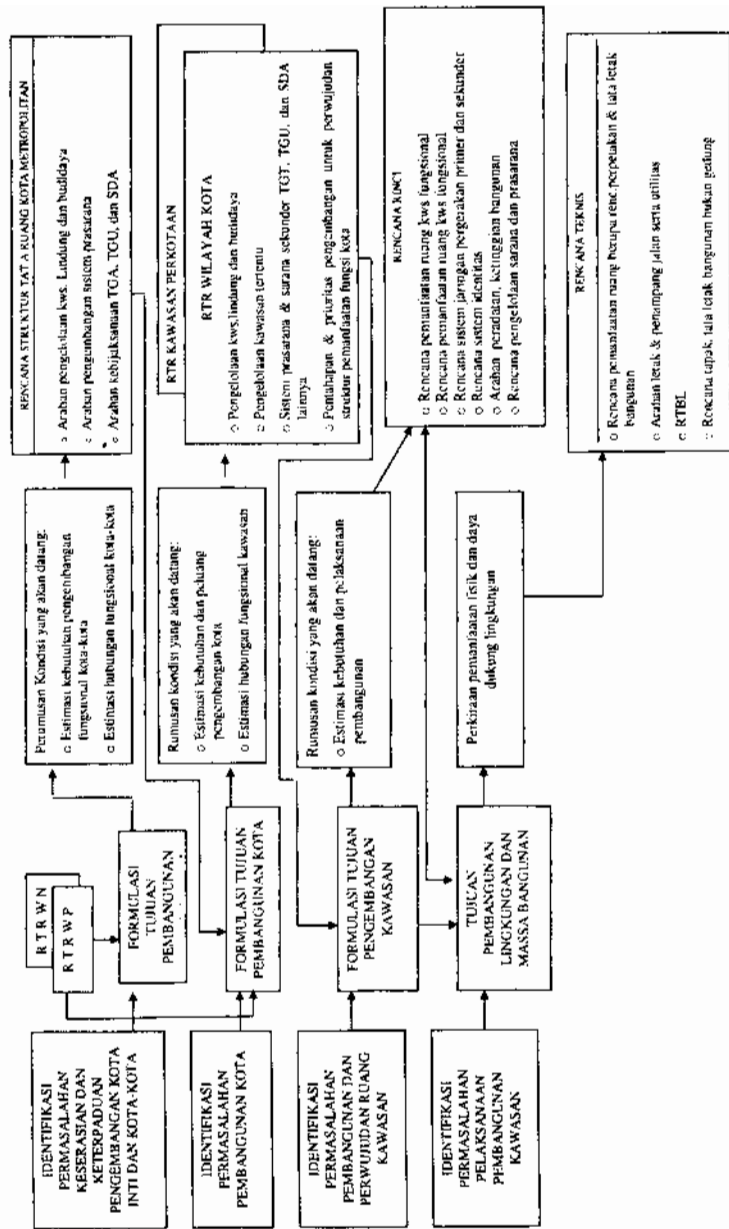
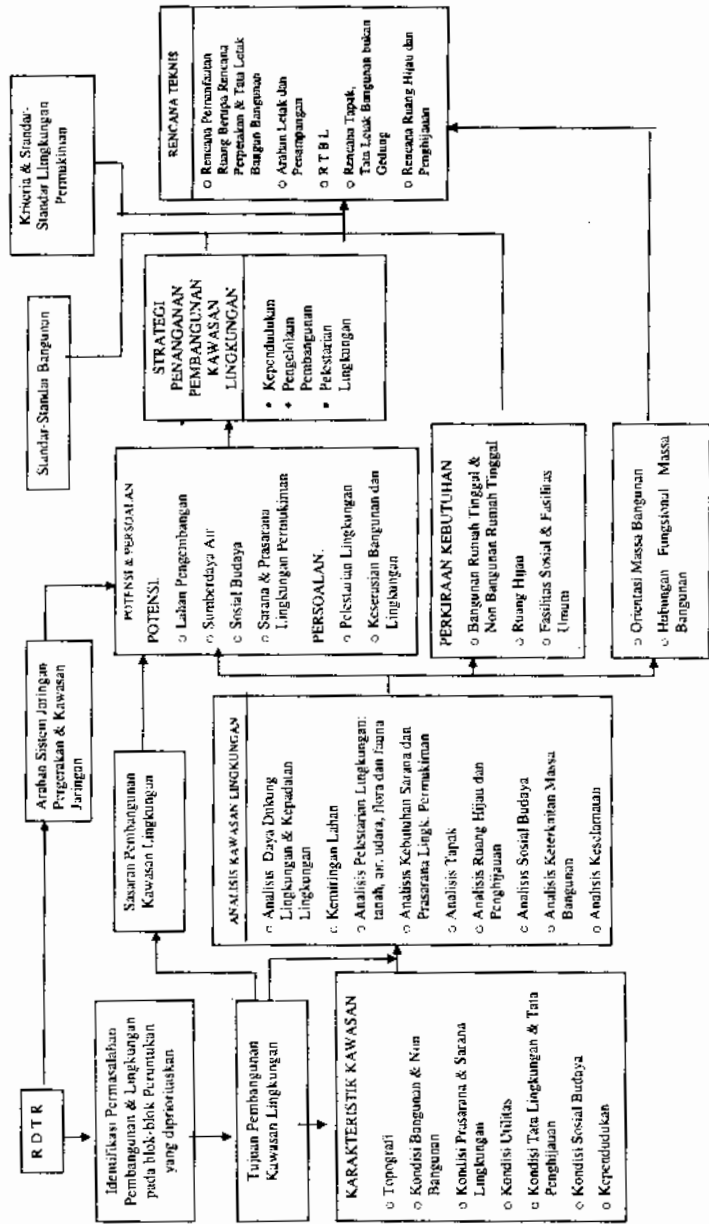


Diagram 3: Proses Penyusunan Rencana Teknik Tata Ruang Kawasan Perkotaan



**RUANG PUBLIK
YANG
AKSESIBILE**



Gb.2.1. Pengguna wheel cair

(Sumber: <http://www.mitra.netra.or.id>)

Pengertian Penyandang cacat (*difable people*) adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, (*Kompas, Rabu, 7 Juni 2000*).

Sebuah organisasi penyandang cacat internasional *DPI (Disabled People International)* mendefinisikan 'disability' sebagai interaksi orang yang memiliki kekurangan secara fisik (*impairment*) dengan hambatan sikap serta lingkungan yang dihadapi.

Apabila peraturan perundang-undangan penyediaan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat itu dikaji, maka konstituen yang ada ialah :

- a. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah R.I dan Menteri Perhubungan R.I. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ialah Gubernur, BUPATI, dengan segenap aparatnya; sebagai pemegang kekuasaan otoritas.
- b. Pengusaha/Pemilik bangunan umum dan pengelola bangunan umum, seperti BUMN, Pengusaha angkutan, Perbankan, dll.
- c. Perancang dalam hal ini *Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) para Arsitek, Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan calon arsitek.*
- d. Pengguna dalam hal ini penyandang cacat berbagai jenis kecacatan, lansia, wanita hamil, anak-anak dan orang sakit.
(sumber : [http:// www. Mitranetra.or.id](http://www.Mitranetra.or.id))

Untuk persyaratan teknis aksesibilitas yang mungkin diterapkan dalam perancangan khususnya di Indonesia dapat dilihat pada *Kepmen PU 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Dalam kepmen ini dibahas mengenai persyaratan teknis dalam perancangan Ukuran dasar ruang Pintu, Ramp, Tangga, Lift, Kamar kecil, Pancuran, Wastafel, Telpon, Perabot Perlengkapan dan peralatan, Rambu.

Perkembangan kota dan tempat-tempat publik saat ini kurang memperhatikan utilitas yang ada, khususnya bagi para penyandang cacat (kaum defabel). Kelemahan perencanaan utilitas ini tentu saja berakibat pada terhambatnya aktivitas-aktivitas para defabel dan menjadikan keterbatasan bagi mereka akan akses dan mobilitas seperti yang dapat dilakukan oleh masyarakat umumnya.

Utilitas yang sebenarnya merupakan sarana dan prasarana yang menunjang suatu aktivitas baik pada lingkup bangunan ataupun perkotaan seharusnya tidak hanya

mendukung orang yang mempunyai fisik dan jiwa yang sehat saja, akan tetapi penyandang cacat yang mempunyai aktivitas yang menuntut adanya kelengkapan utilitas yang menunjang aktivitas mereka.

Perencanaan utilitas yang mendukung defabel telah diterapkan di negara maju dan beberapa negara berkembang sebagai penghargaan atas Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sendiri perencanaan utilitas khusus ini masih sangat kurang, sehingga wacana ini perlu untuk ditelaah lebih lanjut guna memperbaiki kualitas respect sosial kita terhadap kaum defabel. Jawa Tengah yang menjadi salah satu provinsi di Indonesia pada tahun 2007 tercatat jumlah penyandang cacat fisik sebanyak 148.000 orang, baik dewasa maupun anak-anak (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Dati I Jawa Tengah, 2007). Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah pada waktu yang akan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kecelakaan yang terjadi, bencana alam maupun akibat dari suatu penyakit dan penyalahgunaan obat-obatan.

Melihat kondisi yang demikian, maka perlu adanya utilitas bagi penyandang cacat pada kawasan publik di perkotaan sehingga dapat mengurangi kesulitan yang dialami penyandang cacat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Para Hadirin yang saya muliakan.

Dari pidato yang telah saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang publik sebagai bagian dari Tata Ruang Kota di Indonesia sangat berperan untuk meningkatkan kualitas kota. Hal ini perlu dipahami oleh berbagai pihak dan masyarakat agar kesadaran berpartisipasi merawat, menjaga asesori ruang publik lebih ditingkatkan. Forum-forum Asosiasi kota yang sudah terbentuk agar bermitra dengan para pengelola

kota dan masyarakat menjalin kebersamaan membangun ruang publik. Di samping perlu dipikirkan penataan ruang publik yang dapat mengantisipasi bencana yang akhir-akhir ini menimpa rakyat Indonesia di samping memperhatikan aksesibilitas bagi orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda (*diffable people*).

Sebelum mengakhiri pidato saya, saya ingin mengajak rekan-rekan saya di Jurusan Arsitektur untuk senantiasa mengembangkan diri melihat berbagai aspek ilmu agar konsep-konsep Arsitektur yang diciptakan semakin inovatif dan meyakinkan. Kita harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Masalah publikasi merupakan wadah penting untuk mengekspresikan konsep dan gagasan dibidang Arsitektur. Saya yakin bahwa rekan-rekan memiliki banyak ide dan gagasan yang dapat dituangkan dalam publikasi ilmiah Arsitektur dan kota.

Untuk mahasiswa-mahasiswa di Jurusan Arsitektur, saya berpesan agar saudara belajar dengan sebaik-baiknya, berlatih mengembangkan kreativitas dalam desain arsitektur dan cobalah berkomunikasi dengan baik pada orang lain. Dengan demikian saudara akan lebih percaya diri berhadapan dengan siapapun, karena itu merupakan salah satu modal dalam profesi kita sebagai Arsitek. *Capability-SelfConfidence-Comunication* dengan baik

InsyaAllah saudara-saudara mahasiswa akan dapat bersaing didunia kerja baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan dalam orasi pengukuhan sebagai Guru Besar ini, semoga menjadi bahan renungan kita semua. Dengan segala keterbatasan saya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pidato ini baik dari segi substansi, bahasa maupun pemaparannya.

Ketua Senat, Sekretaris Senat serta hadirin yang saya muliakan;

**UCAPAN
TERIMA KASIH
DAN
PENGHARGAAN**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-NYA kepada saya sekeluarga sehingga menjadi Guru Besar, yang bagi saya merupakan berkah dan sekaligus amanah. Saya mohon doa dari hadirin sekalian semua semoga saya dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab tersebut dengan baik, dalam membangun bangsa ini melalui almamater tercinta Universitas Diponegoro sesuai dengan kapasitas saya.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pemerintah RI melalui Menteri Pendidikan Nasional dan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi atas kepercayaan dan persetujuannya mengangkat saya sebagai Guru Besar;
2. Rektor Undip, Senat Undip, Senat Guru Besar Undip;
3. Dekan Fakultas Teknik Undip, Senat Fakultas Teknik Undip dan Ketua Jurusan Teknik Arsitektur atas dukungan dan rekomendasinya yang diberikan kepada saya untuk pengangkatan Guru Besar.
4. Prof.Ir. Eko Budihardjo, MSc (Undip); Prof.Dr.Ir. Sugiono Soetomo, DEA (Undip); Prof.Ir. Mas Santoso, MSc, Ph.D (Alm) (ITS); Prof.Ir. M. Nawayi Loebis, M.Phil, Ph.D (USU); Prof.Ir.Happy Ratna S, MSc, Ph.D (ITS); Prof.Ir. Ramli Rahim, M.Eng (UNHAS) yang telah memberikan rekomendasi khusus bagi pengusulan pengangkatan saya sebagai Guru Besar.
5. Prof.Ir. Joetata Hadihardaja (Undip) & Ir. Sudharmadi.WS, MM yang telah memotivasi dalam proses mengajukan Guru Besar saya.

6. Peer Group Reviewer Prof.Dr.Ir. Sugiono Soetomo, DEA; Prof.dr. H. Soebowo, DSPA; Prof.Ir. Joetata Hadihardaja; Prof.Drs. Soedjarwo; Prof.Drs. Y. Warela, MPA, Ph.D; Prof.Dr. Lachmudin Sya'rani; Prof.Dr.Ir. YS. Darmanto, MSc yang telah memberikan koreksi naskah pidato saya sehingga dapat dipresentasikan pada hari ini.
7. Prof.Ir. Sidharta sesepuh Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik yang telah banyak mendorong karier saya hingga mencapai Guru Besar.
8. Prof.Ir. Totok Roesmanto, M.Eng yang banyak memotivasi dalam penulisan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah sehingga dapat mendukung proses Guru Besar saya.

Secara khusus, dari lubuk hati yang sangat dalam dengan tulus saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Dawam Tirtoatmodjo (Alm) dan Ibu Satiti (Alm), yang mendidik dan membimbing saya dengan kasih sayang sehingga saya menjadi seperti sekarang ini;
2. Mertua saya Bapak S. Poedjo Soekarto (Alm) dan Ibu Rukmi (Alm) atas dukungan, bimbingan nasehat dan doanya;
3. Istri saya tercinta Titi Andayani, SE, MM, dan anak-anak saya yang tersayang Tegar Adhitama, ST, Duta Ardhana, Yumcina Gagarani yang setia mendampingi dalam keadaan apapun, serta memberi inspirasi, motivasi dan dorongan semangat untuk terus berjuang dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.
4. Kakak/Adik Ipar dan adik-adik saya yang senantiasa memotivasi keberhasilan menjadi Guru Besar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada :

1. Keluarga Besar Jurusan Teknik Arsitektur Undip, tempat saya berkarier yang senantiasa menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan karier saya;
2. Rekan-rekan Lab Perancangan Kota dan Permukiman Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA; Ir. Wijayanti, M.Eng; Ir. Atiek Suprapti, MT; Ir. Hermin Werdiningsih, MT; Ir. Titien Woro Murtini, MSA; Ir. Edward Endrianto Pandelaki, MT yang senantiasa mendukung proses Guru Besar saya.
3. Para Guru saya baik sewaktu di SD Negeri Pati Kidul IV, SMP Negeri I Pati, SMA Negeri Pati, atas jasa-jasanya dalam mendidik, membimbing, membentuk kepribadian dan membekali saya ilmu dasar;
4. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu.

Sebagai akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak, Ibu dan para hadirin, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah, kekuatan dan ilmu-NYA kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalammu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentley,I dkk., 1992, Lingkungan yang Tanggap. Sebuah Pedoman bagi Perancang, Penerbit Intermatra, Bandung.
- Bloomer,C 1976, Principles of Visual Perception, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Broadbent,G dkk, 1980, Meaning and Behaviour in The Built Environment, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
- Broadbent,G dkk, 1980, Sign, Symbols, and Architecture, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
- Budihardjo,E 1997, Arsitektur Pembangunan dan Konservasi, Djambatan, Jakarta.
- Burnette,C; Lang,J; Moleski,W; and Vachon,D 1974, Designing for Human Behavior: Architecture and the Behavioral Sciences, Dowden,Hutchinson & Ross, Inc., Stroudsburg, Pennsylvania.
- Childs.M, 1999, Parking Space, Mc Graw-Hill, New York USA.
- Ching,F DK, 1979, Arsitektur : Bentuk,Ruang dan Susunannya, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Cullen.G, 1986, The Concise Townscape, Butterworth-Heineman, Oxford.
- Cohan,N, 1999, Urban Conservation, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Conway,H dan Roenisch,R, 1994, Understanding Architecture, Routledge, New York.
- Darmawan,E, 2003, Teori dan Implementasi Perancangan Kota, Badan Penerbit UNDIP,Semarang.

- Darmawan,E, 2004, *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*, Badan Penerbit UNDIP,Semarang.
- Darmawan,E, 2004, *Problematic Permukiman dan Ruang Kota*, Badan Penerbit Undip,Semarang.
- Darmawan,E, 2005, *Analisis Ruang Publik Arsitektur Kota*, Badan Penerbit UNDIP,Semarang.
- Darmawan,E & Ratnatami,A, 2006, *Bentuk Makna Ekspresi Arsitektur Kota Dalam Suatu Kajian Penelitian*, Badan Penerbit UNDIP,Semarang.
- Darmawan,E; Pandelaki,E,E; Werdiningsih,H; Wijayanti, 2006 *Alun-alun as Democratic Public Space in Sustainable Urban Design*, Proceeding International Seminar On Tropical EcoSettlements, Denpasar Bali.
- Darmawan,E, 2006, *Ruang Publik Dan Implementasi Di Indonesia Dan Beberapa Negara. Proceeding Seminar Universitas Gunadharma*, Jakarta.
- Darmawan,E, 2005, *The Existency Of Green Space In The Human Settlement Create The Quality Of Life*. Proceeding The International Seminar (Senvar VI) FT.ITB, Bandung.
- Darmawan,E, 2005, *Ruang Publik Dalam Pengembangan Spacial Kota. Proceeding Seminar Nasional*. UNDIP Semarang.
- Darmawan,E, 2005, *Ruang Publik Kota dan Kualitas Ruang Kota. Proceeding Seminar Nasional*, Gunadharma Jakarta.
- Darmawan,E, 2004, *Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*, Proceeding Seminar Nasional, Universitas Pandanaran Semarang.
- Darmawan,E, 2003, *Metode Pengungkapan Masalah Untuk Memformulasikan Tujuan Penelitian Arsitektur Kota*, Magister Teknik Arsitektur UNDIP Semarang.

- Darmawan,E, 2003, *The Functional of Public Spaces Towards Friendly City*, Proceeding Seminar International Workshop, USU Medan.
- Darmawan,E, 2002, *Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dalam Penanganan Program Pembangunan dan Perkotaan yang Sinergis*, Proceeding Fakultas Teknik Undip, Semarang.
- Darmawan,E, 2001, *The Dilema of Urban Centre's Roundabout in Semarang*, Proceeding of International Seminar, Medan.
- Darmawan,E, 2001, *Hubungan antara Masjid, Alun-alun dan Elemen-elemen Kota*, Proceeding Seminar Nasional, Semarang.
- Darmawan,E, 2001, *Urban Center Square's Model For Sustainable Development City*, Proceeding SENVAR, UNDIP Semarang.
- Darmawan,E, 2001, *Model Alun-alun Untuk Pengembangan Kota yang Berkelanjutan*, Proceeding of International Seminar, Semarang.
- Darmawan,E, 2001, *Simbioses Bangunan Konservasi dan Modern ditinjau dari Aspek Psikologis*, Proceeding Seminar Nasional, Semarang.
- Darmawan,E, 2000, *Tipologi dalam Urban Design*, Proceeding Seminar Nasional, Semarang.
- Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah, 2001, *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Jakarta.
- Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah, 1992, *UU No.22 Tahun 1992. Tentang Penataan Ruang*, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 1999, *UU No.22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta.
- Frey,H, 1999, *Designing the city*, E & FN Spon, London EC4P 4EE.

- Gifford,R, 1987, Environmental Psychology. Principle and Practise, University of Victoria.
- Heimsath,C, 1980, Behavioral Architecture, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Hesselgren,S, 1975, Man's Perception of Man-Made Environment, Dowden, Hutchinson & Ross,Inc., Pennsylvania.
- Hiss,T, 1990, The Experience of Place, Random House Inc., New York.
- Huat.C.B & Edward.N, 1992, Public Space: Design, Use and Management, Singapore University Press.
- Ibrahim,S, 2000, Perkembangan Regulasi dan Paradigma dalam Penataan Ruang Implikasi Penerapan UU No.22 Th.1999, Pemkot Semarang.
- Jenks,C dan Kropf,K, 1997, Theories and Manifestoes, Academy Editions, Chichester.
- Krier.R, 1979, Theories and Manifestoes, Academy Editions, Chichester.
- Keputusan Menteri PU No 468/KPTS/1998, "Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Lingkungan"
- Lynch,K, 1960, The Image of the City, MIT Press, Cambridge.
- Lynch,K, 1972, What Time is This Place?, MIT Press, Cambridge.
- Lynch,K, 1976, Managing The Sense of Region (foir et lenifier), MIT Press, Cambridge.
- Lynch,K, 1981, Good City Form, MIT Press, Cambridge.
- Marshall,C dan Rossman,G.B, 1989, Designing Qualitative Research, Sage Publications, London.

- Moughtin.C, 1992, Urban Design Street and Square, An Imprint of Butterworth Heinemann Ltd, Linacre House, Oxford.
- Nishimura.Y, 1999, A Memorandum on Trends in Urban Design, Kajima Institute.
- Project for Public Spaces.Inc, 1994, Managing Downtown Public Spaces, APA, Washington DC, Chicago, Illinois.
- Purwanto, 1996, 'Citra Pusat Kota Yogyakarta' Menurut Kognisi Pengamat Menggunakan Kemampuan Peta Mental, Tesis S2 Teknik Arsitektur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah R.I No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Rubeinstein.H.M, 1992, Pedestrian Malls, Streetscapes, and Urban Spaces, John Wiley & Sons Inc, Canada.
- Rapoport,A. 1969, House Form and Culture, Prentice-Hall Inc.Englewood Cliffs, N.J.
- Rapoport,A, 1982, The Meaning of The Built Environment. Sage Publications, London.
- Rif'an,Y, 2002, Kajian Fungsi Ruang Terbuka di kawasan Simpang Lima Terhadap CBD di Pusat Kota, MTA Undip.
- Shirvani,H, 1985, The Urban Design Process, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Simonds.J.O, 1961, Landscape Architecture, Mc Graw-Hill Book. Company, Inc, London
- Spereiregen.P.D, 1965, Urban Design: The Architecture of Towns And Cities. Mc Graw-Hill Book Company, San Fransisco, Toronto, London, Sydney.

- Steele,F, 1981, *The Sense of Place*, CBI Publishing Company,Inc., Massachusetts.
- Tibbalds, 1993, *Urban Enviroment Quality*, MIT. Press Cambridge.
- Tjahjati, B, 2000, *Desentralisasi dan Otonomi Penataan Ruang Sesuai dengan UU No.22 Th 1999*, Pemkot Semarang.
- Torre.LA, 1989, *Waterfront Development*, Van Nostrand Reinhold, New York
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang "Penyandang Cacat – 1997"
- Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007 tentang "Penataan Ruang", Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.